



Untuk segera diterbitkan

Jelang Libur Lebaran, BPK Jateng Telah Serahkan LHP atas 30 LKPD TA 2019

Rabu (20 Mei 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jateng menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019 kepada Pemerintah Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Tegal. Sampai hari ini, BPK Perwakilan Provinsi Jateng telah menyerahkan LHP atas LKPD TA 2019 kepada 30 pemerintah daerah (pemda) di Jawa Tengah. Penyerahan LHP atas LKPD TA 2019 dilakukan oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Ayub Amali kepada para pimpinan DPRD dan kepala daerah secara virtual melalui *video conference*.

Ditengah wabah COVID-19 dan pemberlakuan *work from home* (WFH), kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jateng mengalami beberapa penyesuaian metode. Namun, Ayub Amali menegaskan bahwa pemeriksaan BPK tetap dilaksanakan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) serta tetap menjaga *quality control* dan *quality assurance* yang ketat mulai dari ketua tim, pengendali teknis, penanggung jawab, hingga Kepala Perwakilan.

Kegiatan penyerahan LHP atas LKPD TA 2019 dilaksanakan mulai bulan April s.d. Mei 2020, dibagi menjadi beberapa tahap. Atas 30 LKPD TA 2019 tersebut, semua pemda memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Ketiga puluh pemda tersebut adalah:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pemerintah Kabupaten Blora | 16. Pemerintah Kabupaten Grobogan |
| 2. Pemerintah Kabupaten Karanganyar | 17. Pemerintah Kabupaten Kebumen |
| 3. Pemerintah Kota Salatiga | 18. Pemerintah Kabupaten Pekalongan |
| 4. Pemerintah Kabupaten Boyolali | 19. Pemerintah Kabupaten Jepara |
| 5. Pemerintah Kabupaten Semarang | 20. Pemerintah Kabupaten Klaten |
| 6. Pemerintah Kota Surakarta | 21. Pemerintah Kabupaten Magelang |
| 7. Pemerintah Kabupaten Cilacap | 22. Pemerintah Kabupaten Pemalang |
| 8. Pemerintah Kota Pekalongan | 23. Pemerintah Kabupaten Rembang |
| 9. Pemerintah Kabupaten Demak | 24. Pemerintah Kota Magelang |
| 10. Pemerintah Kabupaten Sragen | 25. Pemerintah Kota Tegal |
| 11. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara | 26. Pemerintah Kabupaten Banyumas |
| 12. Pemerintah Kabupaten Kudus | 27. Pemerintah Kota Semarang |
| 13. Pemerintah Kabupaten Wonogiri | 28. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo |
| 14. Pemerintah Kabupaten Purbalingga | 29. Pemerintah Kabupaten Kendal |
| 15. Pemerintah Kabupaten Pati | 30. Pemerintah Kabupaten Tegal |

Meski telah mendapatkan opini WTP, berdasarkan pemeriksaan, BPK masih menemukan adanya beberapa kelemahan dalam hal sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu menjadi perhatian. Antara lain permasalahan mengenai pengelolaan dan penatausahaan aset tetap, pengelolaan persediaan, pengelolaan kas, kekurangan volume atas pekerjaan belanja modal, dan kelebihan pembayaran atas belanja modal.

SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan



Dalam kesempatan tersebut, Ayub Amali memberikan selamat atas keberhasilan pemda-pemda tersebut dalam mempertahankan opini WTP. Ayub Amali juga menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan DPRD, pimpinan daerah, dan seluruh jajarannya atas kerja sama yang baik sehingga pemeriksaan atas LKPD TA 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa Ayub Amali mengingatkan 30 pemerintah daerah tersebut untuk tetap menjaga dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel walaupun dalam kondisi wabah saat ini.

Keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Jateng mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1441 H dan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H. Semoga Allah mengangkat wabah COVID-19 dan senantiasa meridhoi setiap langkah kita. (*)

Informasi lebih lanjut:

Siti Rahmawati Arifah, Kepala Subbag Humas

Telp. 081285001801

Email: humas.jateng@bpk.go.id